

TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN

Sollah Solehudin¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo

e-mail: sollahsolehudin7@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

World Challenges, Islamic Education and Policy Change

Abstract

The era of globalization which is full of challenges is a period that we cannot avoid. Islamic education must be able to answer these challenges by changing the direction and orientation of education. Islamic education learning innovations in the era of globalization can be carried out with ICT-based learning. Apart from that, the Islamic education/Islamic studies model takes the form of knowledge integration; Islamic studies and other disciplines, and double degrees; Other scientific disciplines and Islamic studies are a form of innovation in responding to the challenges of the world of education. To face the challenges of the world of education such as the Era of Globalization, broad educational autonomy is the answer in order to minimize or eliminate the challenges faced by the world of education as well as an effort to improve the quality of education itself. This era of globalization is also a condition that shows that the world is getting smaller. Azhari calls it a world that is one single place without borders. This globalization makes it possible to become an interactive process that gives rise to a universal culture or civilization, so that the progress and backwardness of a country becomes transparent.

Kata kunci:

Tantangan Dunia, Pendidikan Islam dan Perubahan Kebijakan

Abstrak

Era globalisasi yang penuh dengan tantangan merupakan periode yang tidak dapat kita hindari. Pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan merubah arah dan orientasi pendidikan. Inovasi pembelajaran pendidikan Islam dalam era globalisasi dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis ICT Selain itu, model pendidikan Islam/studi Islam berupa, integrasi pengetahuan; studi Islam dan disiplin ilmu lain, dan gelar ganda; disiplin ilmu lain dan studi Islam merupakan bentuk inovasi dalam menjawab tantangan dunia pendidikan. Untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan seperti Era Globalisasi, otonomi luas pendidikan menjadi jawaban dalam rangka meminimalisir atau menghilangkan tantangan dunia pendidikan yang dihadapi serta sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Era globalisasi ini juga merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia ini sudah semakin mengecil. Azhari menyebutnya dengan istilah dunia yang satu tempat yang tunggal tanpa batas. Globalisasi ini memungkinkan menjadi sebuah proses interaktif yang memunculkan suatu kebudayaan atau peradaban universal, dengan demikian kemajuan dan keterbelakangan suatu Negara menjadi transparan.

PENDAHULUAN

Era reformasi di Indonesia yang dicetuskan sejak bertahun tahun yang lalu terus berjalan dengan tetap berbenah pada arah perbaikan dan peningkatan mutu dan hasil, tanpa kecuali dibidang pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik merupakan produk nyata dari pelaksanaan reformasi pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagai penyempurna dan pengganti UU No 2 Tahun 1989 memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yang semula top down menjadi bottom up, dengan harapan peningkatan mutu pendidikan. Implikasi desentralisasi pendidikan ini adalah adanya pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan dari pusat ke daerah.

Desentralisasi Menghasilkan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi dan hasil reformasi telah menjadi komitmen politik sejak otonomi daerah diberlakukan. Pada saat mulai dilaksanakannya otonomi pendidikan tahun 2000 dengan diundangkannya UU Nomor:22 tahun 1999 dan UU Nomor:32 tahun 2004, daerah memiliki kewenangan luas dan mendalam untuk mengelola pendidikannya, mulai dari pendidikan pra sekolah sampai pendidikan menengah. Semua pihak tanpa kecuali, utamanya pemerintah dan masyarakat di daerah harus mendukung, melaksanakan, dan pendidikan yang berotonomi harus disukseskan. Dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik sekalipun masih memerlukan sistem pengembangan pendidikan yang lebih bagus.

Membicarakan pengembangan sistem pendidikan berarti berkaitan dengan seluruh perubahan atau penyempurnaan atas kebijakan pendidikan yang sifatnya makro sampai dengan penyempurnaan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga perguruan tinggi (mikro) yang dilaksanakan oleh guru atau dosen. Artinya bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan sistem pendidikan dan pembelajaran tersebut. Menurut hemat penulis, sistem pendidikan di Indonesia masih belum mapan ini terbukti banyaknya warga yang belum bisa sekolah sehingga mengasumsikan bahwa yang bisa sekolah adalah mereka yang ekonominya mapan. Apapun masalahnya semua warga Indonesia harus mengenyam pendidikan mengingat pendidikan adalah hak bagi semua manusia. Sehingga perlu kiranya pemerintah membuat kebijakan yang lebih mapan.

Menurut hemat penulis, pemerintah masih linglung dalam membuat kebijakan ini terbukti dari ada banyak kebijakan yang dirasakan masyarakat cukup membingungkan. Misalnya dalam suatu peraturan tentang pendidikan ditegaskan bahwa pendidikan dasar dibiayai oleh negara, namun di sisi lain ada juga peraturan pendidikan yang mengharuskan siswa membayar mahal agar anaknya dapat sekolah di suatu sekolah tingkat SD atau SMP. Selain itu, adanya pergantian buku-buku pegangan anak yang terus terjadipada hampir setiap tahun ajaran ataupun semester. Sehingga buku yang baru saja dipakai satu tahun tidak dapat lagi dipakai oleh anaknya yang lain hanya karena kebijakan tentang kurikulum pendidikan yang terus silih berganti. Hal ini tentunya sangat merugikan orang tua siswa, terutama dari kalangan masyarakat ekonomi kurang mampu. Yang namaya sebuah kebijakan pasti akan mendapat tantangan. Sehingga tantangan tantangan itupun yang berimplikasi untuk adanya perubahan suatu kebijakan yang baru mengingat kebijakan dan tantanga adalah dua hal yang selalu dinamis.

Masalah dan tantangan dalam pendidikan dasar merupakan bagian tidak terpisahkan dari dunia nasional. Sumber lahirnya masalah dan tantangan berasal dari internal (Negara sendiri) dan eksternal (Luar Negeri). Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka, sudah pasti melakukan interaksi dengan dunia internasioanal. Dengan adanya era globalisasi maka menuntut Negara kita bisa menyesuaikan segala kebijakan makro maupun kebijakan pendidikan yang bisa menjaga keutuhan dan kesinambungan pembangunan nasional tanpa kehilangan jati diri bangsa. Karena masalah dan tantangan pendidikan dasar bisa diatasi pemerintah dengan melahirkan berbagai kebijakan dan program yang bisa mengurangi masalah secara bertahap seperti masalah mutu pendidikan, pemerataan, relevansi, efektivitas dan efesiensi pendidikan . Dan hingga saat ini kebijakan mengenai pendidikan masih belum mapan mengingat banyaknya diskriminasi pendidikan dan mutu pendidikan yang masih jauh terbelakang dibandingkan Negara ASEAN lainnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan pendidikan seharusnya menjadikan anak pembelajar sepanjang hayat. "Paling terpenting

menjadikan siswa pembelajar sepanjang hayat karena yang diberikan saat ini belum tentu cocok dengan apa yang dihadapinya pada masa depan," . Belajar sepanjang hayat sama dengan artinya belajar terus-menerus. Tantangan dunia pendidikan bukan menjadikan anak spesialis atau super spesialis melainkan menjadikan anak menjadi pembelajar aktif sepanjang hayat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kajian literatur. Sumber literatur dapat berupa buku, artikel jurnal, makalah konferensi, dan dokumen-dokumen historis lainnya. Peneliti dapat mengumpulkan informasi tentang konsep, teori, dan peristiwa penting yang terkait dengan tantangan dunia pendidikan islam dan implikasinya terhadap perubahan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi

Era reformasi di Indonesia yang dicetuskan sejak bertahun yang lalu terus berjalan dengan tetap berbenah pada arah perbaikan dan peningkatan mutu dan hasil, tanpa kecuali dibidang pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan dari sentralistik menjadi desentralisasi merupakan produk nyata dari pelaksanaan reformasi pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagai penyempurna dan pengganti UU No 2 Tahun 1989 memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yang semula *top down* menjadi *bottom up*, dengan harapan peningkatan mutu pendidikan.

Tilaar mempertegas bahwa desentralisasi merupakan suatu keharusan. Ada tiga hal urgensi disentralisasi pendidikan. Ketiganya adalah: (a) pembangunan masyarakat demokrasi (b) pengembangan social capital (c) peningkatan daya saing bangsa . Yang selanjutnya otonomi pendidikan sebagai konsekuensi dan hasil reformasi telah menjadi komitmen politik sejak otonomi daerah diberlakukan. Pada saat mulai dilangsungkannya otonomi pendidikan tahun 2000 dengan diundangkannya UU Nomor:22 tahun 1999 dan UU Nomor:32 tahun 2004, daerah memiliki kewenangan luas dan mendalam untuk mengelola pendidikannya, mulai dari pendidikan pra sekolah sampai pendidikan menengah. Semua pihak tanpa kecuali, utamanya pemerintah dan masyarakat di daerah harus mendukung, melaksanakan, dan pendidikan yang berotonomi harus disukseskan.

Otonomi pendidikan memang diyakini sebagai modal dasar untuk terselenggaranya pendidikan berkualitas. Otonomi pendidikan juga diyakini dapat menghadapi tantangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Melalui otonomi pendidikan akan terbangun sistem pendidikan yang kokoh di daerah; demokratisasi pendidikan berjalan dengan partisipasi nyata dan luas dari masyarakat, memupuk kemandirian, mempercepat pelayanan, dan potensi sumberdaya lokal di daerah dapat didayagunakan secara optimal untuk suatu kemajuan pendidikan.

Dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan, otonomi luas pendidikan menjadi jawaban dalam rangka meminimalisir -atau menghilangkan- tantangan dunia pendidikan yang dihadapi serta sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Untuk memahami substansi peran otonomi pendidikan dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka selanjutnya akan dibahas mengenai konsep tentang otonomi pendidikan, tantangan dunia pendidikan dan mutu pendidikan sekolah.

Globalisasi

Langgulung menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik. Setiap suasana pendidikan mengandung tujuan-tujuan, maklumat-maklumat berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dinyatakan sebagai materi, dan metode yang sesuai untuk mempersembahkan materi itu secara berkesan kepada anak (Hasan, 2004). Dengan begitu pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kemajuan untuk mencapai manusia yang berwibawa.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya pendidikan harus tersistem dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sistem pendidikan yang baik adalah membuat kebijakan yang mapan sekalipun semua kebijakan pasti ada tantangannya seperti halnya globalisasi. Pada era globalisasi ini baik yang mencakup aspek ekonomi, dan sosial sangat terbuka bagi siapa saja untuk turut bersaing (Chan & T.Sam, 2011). Oleh karenanya persaingan seperti ini menuntut kesiapan Negara secara optimal bila tetap ingin maju.

Era globalisasi ini juga merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia ini sudah semakin mengecil. Azhari menyebutnya dengan istilah dunia yang satu tempat yang tunggal tanpa batas .globalisasi ini memungkinkan menjadi sebuah proses interaktif yang memunculkan suatu kebudayaan atau peradaban universal, dengan demikian kemajuan dan keterbelakangan suatu Negara menjadi demikian transparan.

Banyak sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan internal sekolah. Hal ini terlihat pada sekolah-sekolah yang dikenal dengan *bilingual school*, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Selain itu berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang membuka program kelas internasional. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Apalagi dengan akan diterapkannya perdagangan bebas, misalnya dalam lingkup negara-negara ASEAN, mau tidak mau dunia pendidikan di Indonesia harus menghasilkan lulusan yang siap kerja agar tidak menjadi “budak” di negeri sendiri. Pendidikan model ini juga membuat siswa memperoleh keterampilan teknis yang komplit dan detil, mulai dari bahasa asing, komputer, internet sampai tata pergaulan dengan orang asing dan lain-lain. sisi positif lain dari liberalisasi pendidikan yaitu adanya kompetisi. Sekolah-sekolah saling berkompetisi meningkatkan kualitas pendidikannya untuk mencari peserta didik.

Globalisasi seperti gelombang yang akan menerjang, tidak ada kompromi, kalau tidak siap maka akan diterjang, kalau tidak mampu maka akan menjadi orang tak berguna dan hanya akan menjadi penonton saja. Akibatnya banyak Desakan dari orang tua yang menuntut sekolah menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan desakan dari siswa untuk bisa ikut ujian sertifikasi internasional. Sehingga sekolah yang masih konvensional banyak ditinggalkan siswa dan pada akhirnya banyak pula yang gulung tikar alias tutup karena tidak mendapatkan siswa. Implikasinya, muncullah :

- a. Home schooling, yang melayani siswa memenuhi harapan siswa dan orang tua karena tuntutan global
- b. Virtual School dan Virtual University Munculnya alternatif lain dalam memilih pendidikan
- c. Model Cross Border Supply, yaitu pembelajaran jarak jauh
- d. Model Consumption Aboard, lembaga pendidikan suatu negara menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain;

- e. Model Commercial Presence, yaitu penjualan jasa pendidikan oleh lembaga di suatu negara bagi konsumen yang berada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara tersebut.

Persaingan untuk menciptakan negara yang kuat terutama di bidang ekonomi, sehingga dapat masuk dalam jajaran raksasa ekonomi dunia tentu saja sangat membutuhkan kombinasi antara kemampuan otak yang mumpuni disertai dengan keterampilan daya cipta yang tinggi. Salah satu kuncinya adalah globalisasi pendidikan yang dipadukan dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selain itu hendaknya peningkatan kualitas pendidikan hendaknya selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan, untuk dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik, tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini menjadi salah satu penyebab globalisasi pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai contoh untuk dapat menikmati program kelas Internasional di perguruan tinggi terkemuka di tanah air diperlukan dana lebih dari 50 juta. Alhasil hal tersebut hanya dapat dinikmati golongan kelas atas yang mapan.

Dengan kata lain yang maju semakin maju, dan golongan yang terpinggirkan akan semakin terpinggirkan dan tenggelam dalam arus globalisasi yang semakin kencang yang dapat menyeret mereka dalam jurang kemiskinan. Masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa. Ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Peningkatan kualitas pendidikan yang sudah tercapai akan sia-sia jika gejala sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak diredam.

Selain itu ketidaksiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan ketidaksiapan guru yang berkompeten dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut merupakan perpaduan yang klop untuk menghasilkan lulusan yang tidak siap pula berkompetensi di era globalisasi ini alias lulusan yang kurang berkualitas.

Pendidikan di Indonesia sekarang membuat rakyat biasa sangat menderita. Pendidikan menjadi sesuatu yang tak terjangkau rakyat kecil. Tidak ada penggolongan orang miskin dan orang kaya. Lembaga pendidikan telah dijadikan ladang bisnis dan dikomersialkan.

Kebijakan yang mahal ini memang sangat merisaukan karena akan mengubur impian mobilitas kelas sosial bawah untuk memperbaiki status kelasnya. Melalui sistem ini, maka yang bisa diserap dalam lingkungan pendidikan adalah mereka yang memiliki modal yang cukup. Sekolah kian menjadi lembaga elite dan bahkan menjadi kekuatan yang menghadang arus mobilitas vertikal kelas sosial bawah. Dalam beberapa aktivitasnya bahkan sekolah ikut terlibat melegitimasi tatanan yang timpang. Jika diusut penyebab ini semua, tentu jawabannya adalah kebijakan ekonomi neoliberal. Neoliberalisme berangkat dari keyakinan akan kekuatan pasar serta pelumpuhan kekuasaan negara. Sekolah tidak perlu menjadi tanggungan negara, cukup diberikan pada mekanisme pasar. Biarlah pasar yang akan menyeleksi mana sekolah yang patut dipertahankan dan mana yang harus gulung tikar. Pendidikan berangsur-angsur menjadi tempat eksklusif yang memberi pelayanan hanya pada mereka yang kuat membayar.

Implikasinya, jutaan rakyat Indonesia belum memperoleh pendidikan yang layak. Bahkan tidak sedikit pula yang masih berkategori masyarakat buta huruf. Mereka belum bisa menikmati dunia pendidikan seperti anggota masyarakat yang mampu “membeli” dan menikmati pendidikan. Masyarakat demikian mencerminkan suatu kesenjangan yang serius karena di satu sisi

ada sebagian yang bisa membeli politik komoditi pendidikan secara mahal. Sementara tidak sedikit anggota masyarakat yang tidak cukup punya kemampuan ekonomi untuk bisa membebaskan diri dari buta huruf akibat dunia pendidikan yang tidak berpihak secara manusiawi kepada dirinya. Biaya pendidikan yang melangit ini terjadi di dunia pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Tidak hanya itu implikasi dari makin mahalnya biaya pendidikan. Kualitas mahasiswa yang masuk perguruan tinggi pun nantinya patut dipertanyakan karena bukan tidak mungkin uang yang akan berbicara. Siapa yang lebih banyak bayarnya dia yang akan menang. Bisa jadi mereka yang memiliki kemampuan intelektual pas-pasan bisa mengenyam pendidikan di jurusan dan universitas favorit karena dia bisa membayar biaya yang cukup tinggi. Sementara itu, mereka yang memiliki kemampuan lebih tidak bisa menyandang gelar mahasiswa lantaran tidak memiliki kemampuan finansial.

Realitas menunjukkan, krisis yang menimpa dunia pendidikan di Indonesia, khususnya kualitas pendidikan yang rendah, merupakan persoalan yang sangat kompleks. Prasarana, sarana, dan fasilitas kurang memadai, anggaran pendidikan nasional yang sangat minim, dan banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian atau memang belum layak disebut guru merupakan faktor yang ikut menyulitkan pengembangan kualitas pendidikan.

Perlu di ingat, pada era globalisasi ini akan mengarah pada proses kehidupan urban, serta kebudayaan yang sama dimana saja atau munculnya ide-ide teknologi yang umum. Selain itu telah muncul banyak pernyataan dan keluhan tentang rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang tentu saja terkait dengan mutu lulusan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Padahal, anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan itu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Sungguh ironis memang, anggaran selalu naik tetapi kualitas lulusan tetap rendah dan justru dirasakan semakin mahal. Mengapa hal seperti ini terjadi, padahal kurikulum dan buku, entah sudah berapa kali diubah. Entah sudah berapa macam metode mengajar yang ditatarkan kepada guru. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut, pendidikan tidak dapat disebut sebagai investasi untuk masa depan, jika tidak menghasilkan lulusan yang berkualitas dan diandalkan.

Namun seringkali masyarakat hanya dibuai oleh janji-janji anggaran atau kebijakan bertemakan "alokasi". Faktanya mimpi masyarakat ini sulit terkabul dengan alasan-alasan yang politis. Pejabat belum sungguh-sungguh menempatkan dunia pendidikan ini sebagai penyangga kemajuan bangsa. Kenyataannya memang demikian. Subsidi pemerintah perlahan menyurut hingga tak lagi dapat mencukupi kebutuhan universitas. Namun di balik itu semua ada hal yang terlewatkan oleh para pimpinan universitas yang semakin mahalnya biaya pendidikan. Yakni, kaum miskin hanya bisa gigit jari karena tidak dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi.

Selain itu banyak penyelewengan-penyelewengan anggaran pendidikan yang dilakukan oleh aparat dinas pendidikan di daerah dan sekolah. Peluang penyelewengan dana pendidikan itu terutama dalam alokasi dana rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah serta dana operasional sekolah.

Padahal tujuan utama dari pengucuran dana pendidikan tersebut seperti dana BOS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menaikkan kualitas tenaga pendidik supaya siswa Indonesia memiliki daya saing di tingkat internasional.

Tantangan Umum Dunia Pendidikan

Di era pasca reformasi hingga saat ini, pendidikan nasional setidaknya menghadapi lima tantangan besar yang sangat kompleks. Tantangan tantangan itu saling berkaitan satu sama lain dan memberi dampak langsung terhadap dunia pendidikan, serta dunia pendidikan harus dapat menyikapi tantangan itu secara efektif. Adapun tantangan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan tersebut, menurut Sidi yaitu:

Pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*). Meningkatkan nilai tambah dalam rangka membangun produktivitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan di tengah tuntutan kebutuhan yang tak terbatas.

Kedua, tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi (perubahan) struktur masyarakat, dari masyarakat agraris ke masyarakat modern menuju masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, dengan jalan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (iptek).

Keempat, tantangan terhadap munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik. Dengan demikian, kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Berkembangnya teknologi informasi dalam bentuk komputer dan internet, sehingga bangsa kita menjadi sangat tergantung kepada bangsa Barat dalam hal teknologi dan informasi. Inilah bentuk kolonialisme baru yang menjadi semacam *virtual enemy* yang telah masuk ke seluruh pelosok dunia ini. Semua tantangan itu menuntut SDM Indonesia, khususnya generasi muda terpelajar agar meningkatkan serta memperluas pengetahuan, wawasan keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif), keahlian yang profesional, serta keterampilan kualitasnya.

Kelima, tantangan berkaitan dengan bertambah rusaknya jaman, dekadensi moral yang terus meningkat; dan terpaan secara dahsyad budaya global serta dunia pendidikan dituntut menyiapkan sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki ahlakul karimah, melainkan pula mampu dan tanggap membentengi diri dan mengarahkan pihak lain terhadap berbagai perilaku yang merusak tatanan agama, budaya dan etika bangsa.

Tabel 1 Pola Pikir Menjawab Tantangan Masa Depan

Pola berpikir masa lalu (milenium kedua)	Pola berpikir masa kini (milenium ketiga)
Pembelajaran penting hanya dapat dilakukan melalui fasilitas pembelajaran formal	Orang dapat mempelajari sesuatu dari banyak sumber
Setiap orang harus mempelajari satu isi materi yang sama	Setiap orang memahami proses pembelajaran dan keterampilan dasar pembelajaran
Proses pembelajaran dikendalikan oleh guru. Apa yang diajarkan, bilamana harus diajarkan, dan bagaimana harus diajarkan, semuanya ditentukan oleh seorang profesional	Pendidikan dan pembelajaran merupakan aktivitas interaktif. Keberhasilannya ditentukan oleh seberapa jauh pembelajar dapat bekerjasama sebagai tim.
Pendidikan formal mempersiapkan orang untuk hidup	Pendidikan formal merupakan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Sebutan “pendidikan” dan “sekolah” hampir selalu dalam pengertian yang sama	“Sekolah” hanya salah satu tahapan dalam perjalanan pendidikan
Sekali seseorang meninggalkan pendidikan formal, maka ia memasuki “dunia nyata”.	Pendidikan formal menyediakan satu rentangan interaksi antara pembelajar dengan dunia bisnis, perdagangan, dan politik.
Makin lebih banyak memperoleh kualifikasi formal, maka makin banyak kesuksesan akan diraih.	Makin lebih banyak memiliki kemampuan dan daya adaptasi makin banyak meraih kesuksesan.
Pendidikan dasar dibiayai oleh pemerintah	Pendidikan dasar dibiayai bersama oleh pemerintah dan sektor swasta

Adanya kebijakan dissentralisasi dan globalisasi yang seklaigus terciptanya berbagai tantangan yang baru yang akan melahirkan suatu kebijakan baru tidaklah lain bertujuan untuk menggapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Perbaikan mutu pendidikan itu pada prinsipnya terjadi di dalam sekolah sebagai institusi vital pendidikan. Oleh karena itu, usaha peningkatan mutu pendidikan harus terkait erat dengan usaha pemberdayaan sekolah, guru dan masyarakat dalam mendukung pendidikan persekolahan.

Peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbaiki kurikulum, menambah buku pelajaran, dan menyediakan laboratorium di sekolah. Mutu pendidikan itu merupakan persoalan mikro pendidikan yang terkait dengan persoalan kemampuan guru, kesiapan sekolah dalam mendukung proses belajar dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan, dan partisipasi masyarakat pendukung pendidikan yang ada di wilayahnya disertai penataan manajemen.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi Tantangan Dunia Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Perubahan Kebijakan adalah :

- Tantangan untuk meningkatkan nilai tambah (added value).
- Tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi (perubahan) struktur masyarakat, dari masyarakat agraris ke masyarakat modern menuju masyarakat industri.
- Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, dengan jalan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- Tantangan terhadap munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik.
- Tantangan berkaitan dengan bertambah rusaknya jaman, dekadensi moral yang terus meningkat.

Untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan seperti Era Globalisasi, otonomi luas pendidikan menjadi jawaban dalam rangka meminimalisir -atau menghilangkan- tantangan dunia pendidikan yang dihadapi serta sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Era globalisasi ini juga merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia ini sudah semakin mengecil. Azhari menyebutnya dengan istilah dunia yang satu tempat yang tunggal tanpa batas .globalisasi ini memungkinkan menjadi sebuah proses interaktif yang memunculkan suatu

kebudayaan atau peradaban universal, dengan demikian kemajuan dan keterbelakangan suatu Negara menjadi demikian transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Azril. 2000. "Dampak Globalisasi Di Pendidikan Tinggi Untuk Mengantisipasi Tahun 2020" *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. Tahun Ke 06 No. 023, Mei
- Chan, S. M., & T. Sam, T. (2011). *Analisis SWOT : Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Rajawali Press.
- Djat, I Sidi Indra. 2002. *Menuju Masyarakat Belajar*. Jakarta: Radar Jaya Offset
- Fattah, Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya
- H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Hasan, L. (2004). *Manusia Dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, Filsafat Dan Pendidikan*. *Manusia Dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, Filsafat Dan Pendidikan*, 6.
- Langgulang, Hasan. 1989. *Manusia Dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi, Filsafat Dan Pendidikan* Jakarta: Pustaka Al-Husna
- Sam M. Chan Dan Tuti T. Sam. 2005. *Analisi Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Rja Grafindo Pesada
- Tilaar, 2001. *Menajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosyda Karya